

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL DAN UMUR DENGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

Asratih Rahayu

NPP. 29.0192

Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 29.0192@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *From the recapitulation data on the vote count for the 2020 Padang Pariaman Regent election, it shows that the level of women's political participation in the post-conflict local election of Padang Pariaman Regency is only 61.45%, as many as 38.55% or 59,520 voters out of 154,381 female voters who do not exercise their voting rights. One of the factors causing the lack of political participation is the level of education. A person's level of education can affect many things in life, one of which is political participation. Apart from education, age also affects women's political participation. Indirectly, age affects the level of knowledge of voters about legislative candidates. Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship between formal education level and age with women's political participation in the 2020 Padang Pariaman Regent election. Method: The research method used in this study was a quantitative research method with correlational analysis techniques. The data collection technique used is a questionnaire (questionnaire) and documentation. Result: The results obtained by the authors that the level of women's political participation in the 2020 Padang Pariaman regent election is at a moderate level, this is based on the hypothetical categorization standard according to Azwar (1993), the relationship between the level of formal education and women's political participation in the regent election is positively correlated. significant with the low category level, for the relationship between age and the level of women's political participation in the election of regents is significantly negatively correlated with the level of correlation with the moderate category, while the relationship between the level of formal education and age with women's political participation in the election of regents is not significantly correlated. Conclusion: It can be concluded that women's political participation in the 2020 Padang Pariaman Regent election is at the moderate level, there is a significant relationship between the level of formal education and women's political participation in the regent election, there is a significant relationship between age and female political participation in the regent election, and there is no relationship There is a significant relationship between the level of formal education and age with the level of women's political participation in the 2020 regent election.*

Keywords: *Women's political participation, age, level of formal education.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dari data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati Padang Pariaman tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilukada Kabupaten Padang Pariaman hanya 61,45%, sebanyak 38,55% atau 59.520

pemilih dari 154.381 pemilih kaum perempuan tidak menggunakan hak pilihnya. Pada penelitian ini penulis berfokus pada pengaruh aspek pendidikan dan usia terhadap tingkat partisipasi perempuan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan formal dan umur dengan partisipasi politik perempuan pada pemilihan Bupati Padang Pariaman 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis korelasional. **Metode:** Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket (kusioner) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis bahwa tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilihan bupati Padang Pariaman tahun 2020 berada di tingkat sedang, hal ini didasarkan oleh standar kategorisasi hipotetik menurut Azwar (1993), hubungan tingkat pendidikan formal dan partisipasi politik perempuan pada pemilihan bupati berkorelasi positif secara signifikan dengan tingkat kategori rendah, untuk hubungan antara umur dengan tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilihan bupati berkorelasi negatif secara signifikan dengan tingkat korelasi dengan kategori sedang, sedangkan hubungan antara tingkat pendidikan formal dan usia dengan partisipasi politik perempuan pada pemilihan bupati tidak berkorelasi secara signifikan. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan partisipasi politik perempuan pada pemilihan Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 berada pada tingkat kategori sedang, terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan formal dan partisipasi politik perempuan pada pemilihan bupati, terdapat hubungan signifikan antara umur dengan partisipasi politik perempuan pada pemilihan bupati, dan tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan formal dan umur dengan tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilihan bupati 2020. **Kata kunci:** Partisipasi politik perempuan, usia, tingkat pendidikan formal.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana guna menerapkan asas-asas kedaulatan dalam demokrasi yang di tentukan oleh tangan rakyat yang akan membentuk hubungan kekuasaan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Jurdi 2015:1). Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik merupakan aktivitas seseorang maupun sekelompok orang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah (*Public Policy*). Aktivitas tersebut berupa memberikan suara saat pemilihan umum, ikut menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dan *lobbying* dengan pejabat pemerintah bahkan anggota parlemen, menjadi anggota partai ataupun salah satu gerakan sosial, dan sebagainya. (Miriam: 2008:13).

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan maka peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan perlu diperkuat agar perempuan dapat terlibat langsung dalam politik dengan memasukkan lebih besar porsi perempuan dalam struktur partai politik. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 No.7 pasal 177 yang berisikan mengenai kuota 30% bagi perempuan sebagai salah satu syarat pencalonan anggota legislatif, sebagai upaya keberpihakan kepada perempuan maka seluruh partai politik wajib untuk mentaatinya dan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi di dalam politik.

Dari data rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati Padang Pariaman tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilukada Kabupaten Padang Pariaman masih minim. Dapat dilihat dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Di Kabupaten

Padang Pariaman seluruhnya berjumlah 304.654 orang terdiri dari 150.273 orang laki-laki dan kaum perempuan berjumlah 154.381 orang data diperoleh dari KPU padang pariaman, kemudian kaum perempuan yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 94.861 orang data pemilih legislatif 2020. Jadi jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk kaum perempuan di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 59.520 orang dengan persentase 38,55% yang tidak menggunakan hak pilihnya (KPU Kabupaten Padang Pariaman, 2020).

Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik pada perempuan salah satunya yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan tidak secara langsung membuat pelaku politik ikut berpartisipasi. Pendidikan hanya memberikan dasar-dasar kepada setiap calon pelaku politik. Apabila dasar-dasar ini baik dan kuat, maka besar kemungkinan akan lahir pelaku-pelaku politik yang baik. Berdasarkan hal ini dapat diartikan adanya perbedaan antara masyarakat yang mempunyai sistem pendidikan yang baik dengan masyarakat yang mempunyai sistem pendidikan yang kurang memadai. Selain pendidikan, usia juga mempengaruhi partisipasi politik pada perempuan. Secara tidak langsung usia mempengaruhi tingkat pengetahuan pemilih terhadap calon anggota legislatif. Kondisi umur pemilih berpengaruh terhadap rasa ingin tahu siapa caleg yang bakal dipilih, dari partai mana, bagaimana track record-nya dan apakah pernah terlibat kasus. Umur pemilih juga mempengaruhi bagaimana partisipan menilai serta merespon dan bersikap terhadap cara kampanye caleg. (Muhammad dkk. 2018:113)

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan formal dan usia terhadap partisipasi politik perempuan pada pilkada yang diadakan pada tahun 2020, penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan umur pemilih terhadap partisipasi politik perempuan pada pilkada 2020, tentu saja akan ada perbedaan tingkat partisipasi politik antara pemilih yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maupun yang rendah serta tentu ada perbedaan tingkat partisipasi politik perempuan dikalangan kaum muda dan orang tua.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah masih banyaknya kaum perempuan tidak ikut berpartisipasi politik, banyaknya stigma yang mengatakan bahwa kaum perempuan lebih baik di belakang laki-laki. Termasuk dalam pendidikanpun banyak perempuan yang berpendidikan lebih rendah daripada laki-laki dikarenakan banyaknya stigma masyarakat yang menganggap perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, padahal harusnya perempuan juga harus memiliki pendidikan yang tinggi karena perempuan juga memiliki peran dalam membantu pemerintah dalam pembangunan daerah. Banyak perempuan yang tidak ikut serta dalam partisipasi politik kebanyakan dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka dapatkan, pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Pendidikan mampu mengembangkan pola pikir masyarakat untuk menentukan sikap serta pilihannya dalam kehidupan berpolitik. Apabila pemilih mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi sehingga ketika memilih maka akan sesuai dengan keputusannya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari berbagai pihak. Dalam berpartisipasi orang yang mempunyai tingkat pendidikan dan kecerdasan yang tinggi akan menjadikan seseorang dapat mampu paham akan setiap pilihan politiknya.

Selain pendidikan, usia juga mempengaruhi partisipasi politik pada perempuan. Secara tidak langsung usia mempengaruhi tingkat pengetahuan pemilih terhadap calon anggota legislatif. Pada umumnya partisipan yang berusia muda cenderung mempunyai tingkat

pengetahuan yang tinggi mengenai calon anggota legislatif, dan partisipan yang lanjut usia cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang rendah terhadap calon legislatif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Agus Dedi (2015), yang bertema Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yang memperoleh hasil bahwa Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kelurahan cigembor kecamatan ciamis masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat kaum perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik. Penelitian oleh Ahmad Sahid (2018) yang berjudul Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 Studi Kasus Di Desa Tanjung Aru Dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paserdengen, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi politik desa tanjung aru lebih tinggi dibandingkan desa selengot baik dilihat dalam mengikuti kegiatan kampanye maupun hak pilih. Faktor faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendidikan, faktor kesadaran politik, faktor status sosial dan faktor kedekatan emosional. Penelitian oleh Fernando Marpaung (2016) dengan judul Pengaruh Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Walikota 2012 (Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjung pinang Timur Rt 004/Rw003 Tanjung pinang), yang menemukan hasil bahwa Pengaruh antara Pendidikan terhadap Partisipasi Politik sebesar 19,71%. Sedangkan 80,29% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. dapat diketahui berdasarkan hasil dari nilai koefisien determinasi bahwa Pendidikan mempengaruhi Partisipasi Politik sebesar 19,71% dimana hal ini berdasarkan kriteria dari koefisien determinasi bahwa pengaruh Partisipasi Politik termasuk dalam kategori pengaruh yang rendah. Penelitian oleh Panji Suriyanto (2018) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Karo Tahun 2015 yang menemukan hasil bahwa dari penelitian yang dilakukan usia responden yang paling banyak adalah usia antara 22 - 26 tahun sebanyak 15 orang atau 15% dan yang responden yang paling sedikit berada di usia 62 - 66 tahun sebanyak 2 orang atau 2,3%. Pada masa umur 25 – 40 tahun inilah perkembangan manusia dalam tahap produktif sehingga dapat dikatakan representatif bukan saja di ekonomi namun dari segi keterlibatan hak politik juga sangat berpengaruh. Penelitian dari Layung Paramesti Martha, M.Si, Amiruddin Saleh, dan Parlaungan Adil Rangkuti (2016) Hubungan Penggunaan Sumber Informasi Kampanye Dan Partisipasi Politik Pada Kasus Pilpres 2014 Di Kecamatan Cibinong Bogor mendapatkan hasil bahwa Terdapat hubungan nyata antara karakteristik demografis (jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan, asal kelahiran, lingkungan tempat tinggal, afiliasi politik) dengan partisipasi politik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni melihat hubungan dua aspek demografi yaitu hubungan antara tingkat pendidikan formal dan usia dengan partisipasi politik perempuan dalam pilkada 2020, metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif yang juga berbeda dengan penelitian Agus dedi, Ahmad Sahid, Fernando Merpaung, Panji Suriyanto dan Layung Pramesti Martha dkk. Selain itu uji dan Teknik pengumpulan data yang digunakan juga berbeda yakni dengan menggunakan Uji Rank-spearman dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner tertutup.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi politik perempuan pada pilkada 2020 serta melihat hubungan antara tingkat pendidikan formal dan umur dengan partisipasi politik perempuan pada pilkada 2020 di Kabupaten Padang Pariaman sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal dan umur berpengaruh atau tidak terhadap partisipasi politik perempuan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik korelasional, yaitu penelitian yang dilaksanakan tanpa melakukan perubahan, tambahan ataupun manipulasi terhadap data yang ada untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih (Arikunto 2010:4), kemudian penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan berpatokan pada jumlah daftar Pemilih tetap (DPT) perempuan sebanyak 154.381 jiwa kemudian diolah kedalam rumus dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 jiwa, selanjutnya dalam jumlah sampel dibagi secara merata yaitu 50 responden per kecamatan kedalam 2 kecamatan yang dipilih secara random berdasarkan jarak kecamatan dari ibu kota dikelompokkan menjadi terdekat dan terjauh dari ibukota, kemudian 50 responden per kecamatan tersebut dibagi lagi menggunakan rumus Proporsional Stratified Random Sampling berdasarkan kategori tingkat pendidikan dan umur.

Kemudian dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode kuesioner tertutup yang disajikan dalam bentuk Google Formulir dan kuesioner tertulis sehingga dalam menyebarkan kuesioner bagi kaum lansia atau yang tidak cakap terhadap teknologi bisa mengisi kuesioner berupa kertas sehingga semua responden yang dibutuhkan bias terpenuhi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tingkat Partisipasi Politik perempuan Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Padang Pariaman (Uji Hipotesis Pertama)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pemilih perempuan di Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberikan skor pada masing-masing sampel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Partisipasi Politik Perempuan

Statistics		
PARTISIPASI POLITIK		
N	Valid	100
	Missing	0
Mean		36.88
Std. Error of Mean		1.055
Median		38.00
Mode		22
Std. Deviation		10.553
Variance		111.359
Range		43
Minimum		21
Maximum		64
Sum		3688

Sumber: Hasil pengolahan data dengan program SPSS

Berdasarkan tabel di atas diperoleh skor tertinggi 64, skor terendah 21, mean 36,88, median 38,00, modus 22, dan standar deviasi 10,553. Kategori untuk mengetahui persepsi responden tentang partisipasi politik menggunakan 3 penggolongan yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah. Peneliti memberikan 3 batasan tersebut karena peneliti ingin mengetahui lebih cermat mengenai penggolongan-penggolongan variable-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan standar pembagian kategori seperti tabel dibawah ini

Tabel 2
Standar Kategorisasi Hipotetik

Kategori	Kriteria
Tinggi	$X > \text{Mean hipotetik} + 1,5 \text{ SD hipotetik}$
Sedang	$(\text{Mean hipotetik} - 1,5 \text{ SD hipotetik}) \leq X \leq (\text{Mean hipotetik} + 1,5 \text{ SD hipotetik})$
Rendah	$X < \text{Mean hipotetik} - 1,5 \text{ SD hipotetik}$

Sumber: Azwar (2016)

Dari skala partisipasi politik maka didapatkan:

- Skor min: $1 \times 16 = 16$
- Skor max: $4 \times 16 = 64$
- Mean hipotetik: $= ((\text{Skor maks} - \text{skor min}) : 2) + \text{skor min} = ((64 - 16) : 2) + 16 = (48 : 2) + 16 = 24 + 16 = 30$
- SD hipotetik: $= \text{mean hipotetik} : 6 = 40 : 6 = 6,67$

Maka untuk kategori partisipasi politik perempuan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Kategorisasi Skala Partisipasi Politik Perempuan

Kategori	Kriteria	Frekuensi
Tinggi	$X > 50$	9
Sedang	30-50	62
Rendah	$X < 30$	29

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2022.

Berdasarkan skor kriteria standar yang di atas maka diperoleh 9 perempuan dengan tingkat partisipasi politik kategori tinggi, 62 perempuan termasuk dalam partisipasi politik kategori sedang dan 29 perempuan termasuk dalam tingkat partisipasi politik kategori rendah.

3.2. Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Partisipasi Politik (Uji Hipotesis Kedua)

Perhitungan korelasi Rank Spearman dilakukan dengan merengking terlebih dahulu total skor jawaban responden pada variabel pendidikan dan tingkat partisipasi politik perempuan.

Tabel 4
Uji Rank Spearman's Correlation Tingkat Pendidikan Dan Partisipasi Politik

Correlations				
			PENDIDIKA N	TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
Spearman's rho	PENDIDIKAN	Correlation Coefficient	1.000	.377**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	100	100
	TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN	Correlation Coefficient	.377**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil pengolahan data dengan program SPSS

Berdasarkan output diatas, diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0.000, karena nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < lebih kecil dari 0,05 maka artinya ada hubungan yang signifikan (berarti) antara variabel tingkat pendidikan formal dengan tingkat partisipasi politik perempuan.

Dari output spss diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0.377**. Artinya tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel tingkat pendidikan formal dengan partisipasi politik perempuan adalah sebesar 0,377 atau cukup kuat

Angka koefisien korelasi pada hasil diatas, bernilai positif, yaitu 0,377 sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah (jenis hubungan searah), dengan demikian dapat diartikan bahwa jika pendidikan formal semakin ditingkatkan maka partisipasi politik perempuan juga akan meningkat.

3.3. Hubungan Usia Dengan Partisipasi Politik (Uji Hipotesis Ketiga)

Tabel 5
Uji Rank Spearman's Correlation Usia Dan Partisipasi Politik

Correlations				
			USIA	TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
Spearman's rho	USIA	Correlation Coefficient	1.000	-.476**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	100	100
	TINGKAT	Correlation	-.476**	1.000

	PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN	Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan program SPSS

Berdasarkan output diatas, diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0.000, karena nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < lebih kecil dari 0,05 maka artinya ada hubungan yang signifikan (berarti) antara variabel tingkat pendidikan formal dengan tingkat partisipasi politik perempuan.

Dari output spss diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0.476^{**}. Artinya tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel usia dengan partisipasi politik perempuan adalah sebesar 0,476 atau cukup kuat

Angka koefisien korelasi pada hasil di atas, bernilai negatif, yaitu -0,476 sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat tidak searah, dengan demikian dapat diartikan bahwa jika usia semakin tua maka partisipasi politik perempuan akan semakin menurun.

3.4. Hubungan Tingkat Pendidikan Formal dan Usia Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Perempuan (Uji Hipotesis Keempat)

Tabel 6
Uji Rank Spearman's Correlation Tingkat Pendidikan Formal Dan Usia dengan Partisipasi Politik

Correlations				
			usia dan tingkat pendidikan	PARTISIPASI POLITIK
Spearman's rho	usia dan tingkat pendidikan	Correlation Coefficient	1.000	-.161
		Sig. (2-tailed)	.	.110
		N	100	100
	PARTISIPASI POLITIK	Correlation Coefficient	-.161	1.000
		Sig. (2-tailed)	.110	.
		N	100	100

Sumber: Hasil pengolahan data dengan program SPSS

Berdasarkan output diatas, diketahui nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0.110, karena nilai Sig. (2-tailed) 0,110 > lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan (berarti) antara variabel usia dan tingkat pendidikan formal dengan tingkat partisipasi politik perempuan.

Dari output spss diperoleh angka koefisien korelasi sebesar -0,161 Artinya tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel usia dengan partisipasi politik perempuan adalah sebesar 0,161 atau korelasi sangat lemah

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

3.5.1 Hubungan Tingkat Pendidikan Formal Dengan Partisipasi Politik Perempuan

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Spearman Rank didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan formal dengan partisipasi politik perempuan, yang ditunjukkan dengan diperolehnya nilai nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0.000, dan nilai koefisien korelasi 0,161 termasuk dalam interval 0,20 – 0,39 dan tergolong kategori rendah. Karena nilai koefisien korelasi bertanda positif, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang ditempuh maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik perempuan.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sahid tentang Perbandingan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 Studi Kasus Di Desa Tanjung Aru Dan Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, yang menjelaskan bahwa Faktor pendidikan mempengaruhi perilaku dalam mengikuti kegiatan kampanye. Selain itu, penelitian dari Fernando Marpaung tentang Pengaruh Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Walikota 2012 (Studi Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjung Pinang Timur Rt 004/Rw003 Tanjung Pinang), menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pendidikan terhadap partisipasi politik adalah 19,71% dimana berdasarkan kriteria koefisien determinasi bahwa pengaruh pendidikan partisipasi politik termasuk dalam kategori pengaruh yang rendah. Penelitian lain dari oleh Panji Suroto tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Karo Tahun 2015, berdasarkan penelitiannya dari responden yang dipilih secara acak sebanyak 55 orang atau 54,78% berpendidikan tamat SLTA/Sederajat sedangkan responden yang memiliki pendidikan tinggi sebanyak 30 orang atau 31,33% dari total responden penelitian, ini berarti bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih baik maka kesadaran politiknya dengan sendirinya akan meningkat.

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan hasil penelitian di lapangan terdapat kecocokan. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal pemilih perempuan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilihan bupati Padang Pariaman tahun 2020. Walaupun tingkat korelasi termasuk kategori yang rendah. Dikatakan memiliki hubungan yang sangat rendah karena tingkat pendidikan tidak memiliki hubungan secara penuh dengan partisipasi, partisipasi pemilih pemula itu dapat dipengaruhi dari pendidikan politik baik di sekolah maupun dalam bentuk sosialisasi yang diberikan dan kesadaran akan politik itu muncul dari diri sendiri.

3.5.2 Hubungan Usia Dan Tingkat Partisipasi Politik Perempuan

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Spearman Rank didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan partisipasi politik perempuan, yang ditunjukkan dengan diperolehnya nilai nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 dan nilai koefisien korelasi 0,476 termasuk dalam interval 0,40 – 0,59 dan tergolong kategori sedang, sehingga besar korelasi yang ditunjukkan cukup kuat. Karena nilai koefisien korelasi bertanda negatif, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi usia pemilih perempuan maka akan semakin rendah tingkat partisipasi politik perempuan.

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Panji Suriyanto tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Karo Tahun 2015, dalam penelitiannya Responden dengan persentase tertinggi adalah responden dengan usia antara 22 - 26 tahun sebanyak 15 orang atau 15%, pemilih dengan usia 22- 26 tahun merupakan kelahiran tahun 1993-1997, dari tahun lahir ini dapat dilihat bahwa mereka telah mengalami berbagai revolusi dari perubahan budaya yang terjadi di masyarakat dan perkembangan budaya di dalam menjalani kehidupan maka kategori umur 22-26 tahun ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Selain itu, penelitian dari Martha dkk. tentang Hubungan Penggunaan Sumber Informasi Kampanye Dan Partisipasi Politik Pada Kasus Pilpres 2014 Di Kecamatan Cibinong Bogor menunjukkan bahwa terdapat lima indikator berkorelasi nyata ($p \leq 0.05$) dan arah hubungannya negatif, diantaranya jenis kelamin dengan keterlibatan memberikan suara dan keterlibatan mengawasi Pemilu; usia dengan keterlibatan memberikan suara dan keterlibatan mengawasi Pemilu; asal kelahiran dan keterlibatan kampanye pada peubah partisipasi politik. Sebaliknya pada sub peubah usia, pendapatan dan pendidikan tidak mengindikasikan hubungan yang nyata ($p \leq 0.05$) dengan ketiga dimensi baik keterlibatan kampanye, keterlibatan memberi suara dan keterlibatan mengawasi Pemilu. Namun hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Lebrer W. Milbrath yang mengatakan bahwa seseorang yang berumur 40-59 tahun memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi, dan untuk umur dibawah 40-59 memiliki partisipasi yang lebih rendah.

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan hasil penelitian di lapangan terdapat kecocokan. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal pemilih perempuan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilihan bupati Padang Pariaman tahun 2020. Walaupun tingkat korelasi termasuk kategori yang cukup yang berarti tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah.

3.5.3 Hubungan Usia Dan Tingkat Pendidikan Formal Dengan Partisipasi Politik

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Spearman Rank didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan tingkat pendidikan formal dengan partisipasi politik perempuan, yang ditunjukkan dengan diperolehnya nilai nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0.110 dan nilai koefisien korelasi 0,161 termasuk dalam interval 0,00 – 0,19 dan tergolong kategori sangat rendah, sehingga besar korelasi yang ditunjukkan sangat lemah.

Hal ini kemungkinan terjadi karena ada faktor lain yang turut mempengaruhi namun tidak dimasukkan dalam variabel penelitian, sehingga perlu kiranya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui variabel-variabel atau faktor-faktor lain tersebut. Sejalan dengan penelitian Martha dkk. tentang Hubungan Penggunaan Sumber Informasi Kampanye Dan Partisipasi Politik Pada Kasus Pilpres 2014 Di Kecamatan Cibinong Bogor yang meneliti partisipasi politik dan hubungannya dengan beberapa aspek demografis yaitu Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, Pendapatan, Asal kelahiran, Lingkungan tempat tinggal dan Afiliasi politik. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Peubah karakteristik demografis dan partisipasi politik tidak menunjukkan hubungan nyata antara dimensi afiliasi politik dengan partisipasi politik baik dari dimensi keterlibatan memberi suara maupun keterlibatan mengawasi Pemilu. Sementara afiliasi politik berhubungan nyata negatif dengan keterlibatan kampanye, begitu pula asal kelahiran berhubungan nyata negatif dengan keterlibatan memberikan suara. Jenis kelamin, asal kelahiran dan lingkungan juga memiliki hubungan sangat nyata negatif dengan peubah partisipasi politik. Selain itu Panji Suriyanto juga menegaskan dalam penelitiannya mengenai

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pada Pilkada Serentak Di Kabupaten Karo Tahun 2015, hasil penelitiannya menegaskan terdapat 4 faktor yang menyebabkan meningkatnya partisipasi politik dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Karo Tahun 2015 khususnya tentang kesadaran politik terhadap calon bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 di Kabupaten Karo yaitu faktor sosial ekonomi, faktor politik, faktor fisik individu dan lingkungan dan faktor nilai budaya.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan dari hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik perempuan namun dalam kategori rendah, dan untuk variabel umur berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik perempuan namun dalam kategori sedang, sedangkan untuk variabel tingkat pendidikan formal dan umur dengan tingkat partisipasi politik perempuan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

IV. KESIMPULAN

Hasil uji hipotesis pertama di dapatkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan dalam pilkada di Kabupaten Padang Pariaman 2020 berdasarkan skor kriteria standar diperoleh sebagai berikut: 9% perempuan dengan tingkat partisipasi politik kategori tinggi, 62% perempuan termasuk dalam partisipasi politik kategori sedang dan 29% perempuan termasuk dalam tingkat partisipasi politik kategori rendah, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan di kabupaten padang pariaman dalam kategori sedang.

Hasil uji hipotesis kedua dengan menggunakan korelasi rank-spearman membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan formal dengan partisipasi politik perempuan ditunjukkan dengan hasil nilai Sig. (2-tailed) $0,000 <$ lebih kecil dari $0,05$ dan nilai koefisien korelasi $0,161$ tergolong kategori rendah. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan formal dengan partisipasi politik perempuan pada pilkada Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 terbukti.

Hasil uji hipotesis ketiga dengan menggunakan korelasi rank-spearman membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan partisipasi politik perempuan ditunjukkan dengan hasil nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar $0,000$, karena nilai Sig. (2-tailed) $0,000 <$ lebih kecil dari $0,05$ dan nilai koefisien korelasi $0,476$ tergolong kategori sedang. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan terdapat hubungan yang signifikan umur dengan partisipasi politik perempuan pada pilkada Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 terbukti.

Hasil uji hipotesis keempat dengan menggunakan korelasi rank-spearman membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan formal dan umur dengan partisipasi politik perempuan ditunjukkan dengan nilai nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar $0,110$, karena nilai Sig. (2-tailed) $0,110 >$ lebih besar dari $0,05$ dan nilai koefisien korelasi $0,161$ termasuk tergolong kategori sangat rendah. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan formal dan umur dengan partisipasi politik perempuan pada pilkada Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 tidak terbukti.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada dua kecamatan saja dan mengukur dua faktor saja yang dipilih, sehingga masih ada faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik yang tidak di ukur dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan dengan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Padang Pariaman untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Aftah, A. 2017. PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILUKADATAHUN 2015 (StudipadaIbu-IbuRumahTangga di KelurahanSidodadi KecamatanKedaton Bandar Vol. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asa Abednego, Bornadus. 2017. "Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula DALAM Pilkada DKI Jakarta 2017 Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur."
- Azwar, Saifuddin. 2011. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Azwar, Saifuddin. 2016. "Kelompok Subjek Ini Memiliki Harga Diri Yang Rendah"; Kok, Tahu...?" Buletin Psikologi 1(2):13–17. doi: 10.22146/bps.13160.
- Bungin, Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cholisn, Nasiwan. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.
- Faulks, Keith. 2010. Sosiologi politik - Google Books. Bandung: Nusa Media.
- Hamdi, Muchlis, dan Siti Ismaryati. 2014. Metodologi Penelitian Administrasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2015. Pengantar Hukum Pemilihan Umum - Fajlurrahman Jurdi - Google Buku. Jakarta: Kencana.
- Martha, Layung Paramesti, Amiruddin Saleh, dan Parlaungan Adil Rangkuti. 2016. "Hubungan Penggunaan Sumber Informasi Kampanye Dan Partisipasi Politik Pada Kasus Pilpres 2014 Di Kecamatan Cibinong Bogor." Jurnal Komunikasi Pembangunan 13(2):50–63. doi: 10.46937/13201513779.
- Martono, Nanang. 2010. Statistik Sosial: Teori dan Aplikasi Program SPSS. Yogyakarta: Gava Media.
- Miaz, Yalvema. 2012. Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi.
- Muhammad, Adji Suradji, Rodi Wahyudi, Pery Rahendra Sucipta, dan Gusrizal. 2018. Orientasi-Pemilih-Perempuan_Unesco_HVS-REVISI-cetak-compressed. K-Media.
- Mujani, Saiful. 2007. Muslim demokrat : Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru. Penerbit Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Yayasan Wakaf Paramadina, Freedom Institute [dan] Kedutaan Besar Denmark.
- Mujani, Saiful., R. William Liddle, dan Kuskridho. Ambardi. 2012. Kuasa rakyat : analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-Orde Baru. Jakarta: Mizan.
- Muslimin, Khoirul. 2020. Buku Ajar Komunikasi Politik - Google Books. Ed.1-cet.2. diedit oleh S. Saidah. Yogyakarta: UNISNU PRESS.

- Priambodo, Arif. 2000. "Sikap Politik, Pengaruh Kelompok, Dan Partisipasi Politik Di Kalangan Mahasiswa." Universitas Indonesia, Depok.
- Purwanto, Nurtanio Agus. 2008. Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan. Vol. 14.
- Sugiyono. 2013. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sulistiyanto, Doni Fitriani. 2016. "Pengaruh Kedisiplinan Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Se-Dabin Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo." Skripsi.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia

INTERNET

KPU Kabupaten Padang Pariaman. 2020. "Pengumuman Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020." Diambil 31 Agustus 2021 (<https://kab-padangpariaman.kpu.go.id>).